

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Sahelangi S. Yesaya¹, Maria H. Pratiknjo², Very Y. Londa³

^{1,2,3}Universitas Sam Ratulangi

E-mail : yesayasahelangi@gmail.com¹, mariapratiknjo31@gmail.com²,
verylonda@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Vocational Education and Training Revitalization policy in North Sulawesi Province based on Presidential Regulation Number 68 of 2022 and North Sulawesi Governor Decree Number 571 of 2023. The research problem is how the vocational education and training revitalization policy is implemented by the North Sulawesi Provincial Government. This study uses a qualitative descriptive approach with a policy implementation analysis model by George C. Edward III, which highlights four main indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation studies of relevant agencies such as the Regional Education Office, the Manpower and Transmigration Office, the Regional Development Planning Agency (Bappeda), and the Vocational Training Center (BLK). The results show that the implementation of the vocational revitalization policy in North Sulawesi Province has been running well, but not yet fully optimal. In terms of communication, the policy has been socialized through various official forums and cross-sector coordination, but there are still differences in perceptions among implementers and weak coordination at the technical level. In terms of resources, the government has made efforts to improve the quality of educators, instructors, and training facilities, but their availability is uneven and still limited in urban areas. In terms of disposition, most implementers demonstrated a positive attitude toward the policy, but motivation and structural support varied across regions. Meanwhile, the bureaucratic structure demonstrated complex inter-agency coordination and the absence of a digitally integrated reporting system, resulting in less than optimal policy implementation effectiveness. In conclusion, the vocational education and training revitalization policy in North Sulawesi has had a positive impact on strengthening cooperation between education and industry (link and match), but still requires improved coordination, resource support, and bureaucratic restructuring to make its implementation more adaptive and efficient. This research recommends that the North Sulawesi Provincial Government strengthen regional vocational communication forums, increase investment in teacher training and practical facilities, provide performance-based incentives for policy implementers, and establish a cross-sectoral Task Force with authority for integrated monitoring and evaluation. Thus, the vocational revitalization policy can significantly contribute to improving the quality of human resources and reducing unemployment in North Sulawesi..

Keywords: Policy Implementation, Vocational Education, Vocational Training, Vocational Revitalization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan *Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi* di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan *Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022* dan *Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 571 Tahun 2023*. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** dengan model analisis implementasi kebijakan dari **George C. Edward III**, yang menyoroti empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap instansi terkait seperti Dinas Pendidikan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bappeda, serta Balai Latihan Kerja (BLK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi vokasi di Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Dari segi **komunikasi**, kebijakan telah disosialisasikan melalui berbagai forum resmi dan koordinasi lintas sektor, tetapi masih ditemukan perbedaan persepsi antar pelaksana dan lemahnya koordinasi di tingkat teknis. Dari aspek **sumber daya**, pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik, instruktur, dan sarana pelatihan, namun ketersediaannya belum merata dan masih terbatas di wilayah perkotaan. Pada aspek **disposisi**, sebagian besar pelaksana menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan, tetapi motivasi dan dukungan struktural masih bervariasi antar daerah. Sementara itu, aspek **struktur birokrasi** menunjukkan adanya kompleksitas koordinasi antarinstansi dan belum adanya sistem pelaporan yang terintegrasi secara digital, sehingga efektivitas implementasi kebijakan belum maksimal. Kesimpulannya, kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Sulawesi Utara telah memberikan dampak positif terhadap penguatan kerja sama antara dunia pendidikan dan industri (*link and match*), tetapi masih memerlukan peningkatan koordinasi, dukungan sumber daya, dan restrukturisasi birokrasi agar pelaksanaannya lebih adaptif dan efisien. **Saran** penelitian ini adalah agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat forum komunikasi vokasi daerah, meningkatkan investasi pada pelatihan tenaga pendidik dan sarana praktik, memberikan insentif berbasis kinerja bagi pelaksana kebijakan, serta membentuk *Task Force* lintas sektor yang berwenang dalam monitoring dan evaluasi terpadu. Dengan demikian, kebijakan revitalisasi vokasi dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan angka pengangguran di Sulawesi Utara.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Vokasi, Pelatihan Vokasi, Revitalisasi Vokasi.

PENDAHULUAN

Pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan strategi utama dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar lebih siap menghadapi pasar kerja. Pendidikan vokasi berfokus pada penguasaan kompetensi aplikatif, sehingga lulusannya memiliki keterampilan lebih

spesifik dibandingkan pendidikan umum. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pendidikan vokasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran. Pengangguran terjadi akibat kurangnya lapangan kerja atau ketidaksesuaian keterampilan dengan permintaan industri.

Di negara-negara seperti Jerman, Swiss, dan Finlandia, sistem pendidikan vokasi efektif dalam menekan angka pengangguran melalui model dual system, yang menghubungkan dunia pendidikan dengan industri. Laporan *World Economic Forum* (2023) menyebutkan bahwa negara dengan sistem vokasi kuat memiliki tingkat pengangguran lebih rendah karena tenaga kerja lebih siap memasuki pasar kerja. Di Jerman, lebih dari 50% siswa mengikuti pendidikan vokasi, membantu menekan pengangguran muda hingga di bawah 5%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan dunia kerja dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja di era globalisasi.

Pendidikan vokasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Meskipun pemerintah telah meluncurkan inisiatif seperti revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), tingkat pengangguran di kalangan lulusan vokasi tetap tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional pada Agustus 2024 mencapai 4,91%, menurun dari 5,32% pada Agustus 2023. Namun, penurunan ini belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan penyerapan tenaga kerja lulusan vokasi. Salah satu penyebab utama adalah ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan industri, atau yang dikenal sebagai *skill mismatch*. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan vokasi belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika pasar kerja yang terus berubah. Akibatnya, banyak

lulusan memiliki keterampilan yang tidak sesuai dengan permintaan industri, sehingga menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan meskipun telah menjalani pelatihan teknis. Untuk mengatasi permasalahan ini, konsep *link and match* antara lembaga pendidikan dan dunia industri telah diusulkan sejak akhir 1980-an. Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan dan sektor industri dalam merancang kurikulum, metode pembelajaran, dan penjaminan mutu agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Implementasi efektif dari konsep ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja terampil di Indonesia.

Pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan strategi utama dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar lebih siap menghadapi pasar kerja. Di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi, pendidikan vokasi berperan penting dalam menjembatani dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI). Hal ini menjadi landasan utama diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang bertujuan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi di Indonesia. Sebagai bagian dari strategi pengembangan pendidikan vokasi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 mengenai Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia industri,

memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan dunia kerja (DUDIKA), serta memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Salah satu fokus utama dalam kebijakan ini adalah pentingnya sertifikasi kompetensi sebagai syarat agar lulusan dapat bersaing di dunia profesional.

Perpres Nomor 68 Tahun 2022 juga memuat prinsip-prinsip pokok revitalisasi, seperti penguatan ekosistem vokasi, peningkatan kualitas standar kompetensi, pengakuan keterampilan melalui sertifikasi, serta pemanfaatan sumber pendanaan secara optimal. Pemerintah menegaskan bahwa sertifikasi menjadi kunci untuk menjamin kompetensi lulusan diakui oleh industri, baik di level nasional maupun internasional. Di samping itu, kebijakan ini juga mendorong penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi, peningkatan peran Balai Latihan Kerja (BLK), serta keterlibatan aktif sektor swasta dalam menyukseskan program pelatihan vokasi.

Pendidikan dan pelatihan vokasi memegang peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi dinamika kebutuhan pasar kerja. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan telah mendorong revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing nasional. Di Provinsi Sulawesi Utara, kebijakan revitalisasi ini menjadi prioritas dalam menjawab tantangan ketimpangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, rendahnya serapan lulusan ke dunia industri, serta keterbatasan keterampilan tenaga kerja lokal.

Namun, dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Provinsi Sulawesi Utara, berbagai persoalan muncul yang menghambat efektivitas implementasinya yang berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari segi komunikasi, implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan secara konsisten dan jelas. Koordinasi antara pemerintah provinsi, satuan pendidikan vokasi, dan mitra industri masih menunjukkan ketimpangan dalam pemahaman dan persepsi terhadap substansi serta tujuan kebijakan revitalisasi. Informasi kebijakan sering kali tidak tersampaikan secara efektif ke unit pelaksana teknis, menyebabkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan program. Pada aspek sumber daya menjadi tantangan besar. Banyak lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi di daerah masih kekurangan tenaga pengajar yang kompeten di bidang kejuruan, keterbatasan sarana dan prasarana praktik, serta dana operasional yang tidak memadai. Hal ini berakibat pada rendahnya kualitas pembelajaran vokasi dan tidak optimalnya penguasaan keterampilan peserta didik.

Dalam hal disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan, ditemukan bahwa tidak semua pelaksana di lapangan menunjukkan komitmen dan pemahaman yang memadai terhadap pentingnya revitalisasi pendidikan vokasi. Rendahnya motivasi, kurangnya pelatihan, serta resistensi terhadap perubahan menghambat semangat pelaksanaan kebijakan secara optimal. Sedangkan dari sisi struktur birokrasi, implementasi kebijakan sering kali terhambat oleh sistem tata kelola yang kaku, tumpang tindih kewenangan antar

instansi, serta lambatnya proses pengambilan keputusan. Fragmentasi kelembagaan antara dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, dan dunia usaha menyebabkan koordinasi lintas sektor menjadi tidak efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa meskipun kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi memiliki tujuan yang strategis, namun implementasinya di Provinsi Sulawesi Utara menghadapi berbagai kendala dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana kebijakan ini diimplementasikan, serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat efektivitas revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di tingkat daerah.

Perpres Nomor 68 Tahun 2022 berlaku untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia tanpa terkecuali di Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) telah menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Sebagai langkah konkret dalam menindaklanjuti kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Keputusan Gubernur Sulut Nomor 571 Tahun 2023 yang menetapkan pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV). Pembentukan tim ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga lulusan tidak hanya memiliki keterampilan yang sesuai dengan

permintaan pasar kerja, tetapi juga berpotensi menjadi wirausahawan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah merancang strategi vokasi yang selaras dengan kebutuhan sektor industri lokal, memperkuat koordinasi lintas instansi, dan menjamin akses terhadap fasilitas pelatihan dan pendidikan yang layak.

TKDV di Sulut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah terkait, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) daerah, perguruan tinggi vokasi, asosiasi profesi, serta perwakilan DUDI. Langkah ini sejalan dengan amanat Perpres 68/2022 yang menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix dalam memperkuat ekosistem pendidikan vokasi di daerah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulut juga aktif dalam menyusun rencana strategis dan kebijakan operasional yang mengacu pada Strategi Nasional (Stranas) Vokasi. Hal ini mencakup penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan DUDI, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik, serta penyediaan fasilitas pelatihan yang memadai. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi Perpres 68/2022 di Sulawesi Utara dapat meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan vokasi, serta mengurangi tingkat pengangguran melalui penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tercatat stabil di atas 5% dengan capaian 5,21% pada triwulan ketiga tahun 2024, tetapi tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih menunjukkan angka yang tinggi, yakni 5,85% pada Agustus 2024, melebihi rata-rata nasional. Kota Manado menjadi

wilayah dengan pengangguran tertinggi sebesar 8,73%, sementara Kabupaten Sitaro menempati posisi terendah dengan 1,94%. Kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menciptakan cukup banyak lapangan pekerjaan, terutama bagi lulusan baru atau mereka yang terdampak oleh perubahan struktur industri.

Tingginya TPT di Sulut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor seperti perdagangan, akomodasi, dan transportasi yang umumnya menghasilkan pekerjaan informal atau musiman, sehingga tidak signifikan dalam menyerap tenaga kerja formal secara berkelanjutan. Kedua, *mismatch* keterampilan tetap menjadi tantangan utama, karena banyak tenaga kerja yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri saat ini. Ketiga, sektor industri pengolahan yang berpotensi tinggi dalam menyerap tenaga kerja justru menunjukkan tren penurunan, sementara tenaga kerja lebih banyak terserap ke sektor pertanian seiring dengan musim panen.

Berdasarkan data pemerintah Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa lulusan SMA memiliki tingkat keterserapan kerja yang lebih tinggi dibandingkan lulusan SMK selama periode 2021–2024. Pada Agustus 2024, sekitar 27,49% lulusan SMA telah bekerja, sedangkan lulusan SMK hanya sebesar 12,73%. Padahal, SMK didesain untuk menyiapkan siswa agar lebih siap memasuki dunia kerja, namun realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berasumsi bahwa implementasi kebijakan

revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi perlu dianalisis secara menyeluruh melalui tinjauan terhadap proses pelaksanaan dan kesesuaian antara kebijakan dengan kondisi riil di daerah. Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan ini antara lain adalah penerapan kurikulum berbasis kebutuhan industri, kemitraan strategis antara lembaga vokasi dan dunia usaha, serta penyediaan program pelatihan tambahan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja. Di Provinsi Sulawesi Utara, meskipun pendekatan pendidikan yang berbasis industri dan kewirausahaan sudah mulai diterapkan, pengawasan dan evaluasi yang konsisten masih diperlukan untuk menjamin keberhasilan program. Keberadaan infrastruktur pelatihan, kompetensi tenaga pendidik, serta akses terhadap program magang dan sertifikasi menjadi faktor krusial dalam memastikan kebijakan ini berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

menganalisis pelaksanaan kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam tiga ranah utama, yakni aspek teoritis, praktis, dan akademis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya pengembangan teori di bidang implementasi kebijakan publik, khususnya yang berfokus pada revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai strategi dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan serta ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*).

2. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan serta evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi, sehingga lebih sejalan dengan kebutuhan dunia industri dan berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini juga berpotensi menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti lain yang berminat mendalami studi terkait implementasi kebijakan pendidikan vokasi maupun isu-isu ketenagakerjaan di daerah berbeda. Dalam konteks pemerintahan, istilah kebijakan seringkali dikaitkan dengan

konsep kebijakan publik. Dalam wacana internasional, kebijakan publik atau *public policy* dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat dan harus ditaati oleh seluruh warga negara. Apabila aturan tersebut dilanggar, pelanggar dapat dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahan yang ditentukan oleh otoritas berwenang dan dilaksanakan secara terbuka (Nugroho, 2004). Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian tindakan yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang berdampak pada masyarakat luas serta mencapai tujuan tertentu. James E. Anderson (2022) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kumpulan tindakan yang terencana dan dijalankan oleh individu atau kelompok yang memiliki kewenangan dalam rangka menangani isu-isu tertentu.

Bentuk dari kebijakan publik bisa berupa regulasi, program, keputusan administratif, maupun peraturan hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat dan pengawasannya dilakukan oleh lembaga resmi. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai instrumen hukum. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan umum dianggap perlu untuk diatur, maka isu tersebut diangkat menjadi bahan kebijakan publik oleh pejabat yang berwenang. Setelah melalui proses legalisasi, kebijakan tersebut dituangkan dalam

bentuk hukum formal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah, yang keberlakuannya bersifat mengikat. Proses penyusunan kebijakan publik sendiri merupakan proses yang kompleks karena harus mempertimbangkan berbagai tahapan dan faktor secara menyeluruh.

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III, yang mengidentifikasi empat variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kerangka teori ini digunakan sebagai alat analisis untuk menelaah secara mendalam proses implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Provinsi Sulawesi Utara, guna memahami sejauh mana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat daya saing sumber daya manusia Indonesia di era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang menjadi pijakan hukum dalam penguatan sinergi antara dunia pendidikan, pelatihan, dan dunia kerja

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berfokus pada wilayah administratif Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dengan perhatian utama terhadap institusi-institusi yang memiliki kewenangan serta peran strategis dalam menjalankan kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kebijakan ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 571 Tahun 2023 terkait pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (TKDV).

Pemilihan lokasi studi dilakukan secara purposif pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki hubungan langsung dengan implementasi kebijakan, yakni Dinas Pendidikan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara. Ketiga lembaga tersebut dipilih berdasarkan posisi strategis serta tanggung jawabnya dalam pengembangan sistem tata kelola dan penguatan ekosistem kebijakan vokasi di tingkat provinsi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan melalui penelaahan interaksi antar pelaksana, proses perumusan dan pelaksanaan program, serta identifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan program revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayah Sulawesi Utara.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu selama kurang lebih tiga

bulan. Jangka waktu tersebut mencakup seluruh tahapan kegiatan, dimulai dari proses penyusunan proposal penelitian, kegiatan bimbingan akademik bersama dosen pembimbing, hingga penyusunan dan penyajian hasil penelitian dalam bentuk tesis secara utuh.

Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam suatu fenomena sosial yang bersifat kompleks, yaitu pelaksanaan kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Provinsi Sulawesi Utara. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan dengan karakter permasalahan yang dikaji, yakni menyelidiki proses implementasi kebijakan publik yang melibatkan beragam aktor, lembaga, serta dinamika pelaksanaan di tingkat pemerintahan daerah.

Pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan dalam penelitian ini guna menyajikan gambaran secara terstruktur dan berdasarkan fakta mengenai berbagai dimensi yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi pola komunikasi antar pelaksana, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, konfigurasi struktur birokrasi, serta sikap dan komitmen para aktor kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada penggalan makna, pemahaman mendalam, serta interpretasi terhadap realitas sosial berdasarkan perspektif para informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan.

Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk menelusuri dan memahami makna yang dikonstruksi oleh individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial atau isu kemanusiaan. Makna tersebut diperoleh peneliti melalui pengumpulan data langsung dari lapangan, seperti wawancara, pengamatan, maupun studi dokumen yang relevan. Di sisi lain, menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh suatu fenomena sebagaimana dialami oleh partisipan, dengan memaparkan hasil temuan dalam bentuk narasi atau deskripsi verbal, dalam konteks yang alami dan menggunakan pendekatan ilmiah secara menyeluruh.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berupaya merekonstruksi realitas implementasi kebijakan di lapangan melalui interaksi langsung dengan informan kunci yang berasal dari instansi pemerintah, dunia usaha dan industri, serta lembaga pendidikan vokasi.

Fokus Penelitian

Penelitian ini memusatkan perhatian pada pelaksanaan kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Provinsi Sulawesi Utara, yang merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 serta Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 571 Tahun 2023. Analisis terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edward III, yang menggarisbawahi empat unsur utama

sebagai tolok ukur, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap atau disposisi pelaksana, serta struktur organisasi birokrasi, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merujuk pada menilai sejauh mana proses komunikasi kebijakan dari pemerintah pusat sampai ke tingkat pelaksana di daerah dilakukan secara efektif, konsisten, dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

2. Sumber Daya

Dalam konteks penelitian ini, sumber daya mencakup mengidentifikasi ketersediaan sumber daya manusia, dana, sarana-prasarana, serta dukungan teknologi dan informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan revitalisasi vokasi.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana mengacu pada penilaian terhadap tingkat komitmen, motivasi, serta kesediaan para pelaksana kebijakan dalam mendukung keberhasilan revitalisasi vokasi.

4. Struktur Birokrasi

Menganalisis struktur organisasi, mekanisme koordinasi, serta kejelasan pembagian tugas antar lembaga pelaksana kebijakan di daerah.

Dengan menggunakan keempat aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi telah diimplementasikan secara efektif di Provinsi Sulawesi Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang

mendukung dan menghambat proses implementasi kebijakan tersebut.

Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan. Teknik ini diterapkan melalui pemilihan individu secara sengaja (*purposefully selected*) berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Provinsi Sulawesi Utara.

Menurut Creswell (2014), *purposive sampling* merupakan strategi yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti secara sadar dan terencana memilih partisipan dan lokasi penelitian yang dinilai paling mampu memberikan informasi yang kaya dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan posisi, kewenangan, serta keterlibatan mereka dalam kebijakan vokasi, agar diperoleh pemahaman yang kontekstual dan relevan terhadap fokus penelitian.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang substantif dari informan kunci yang berperan secara langsung dalam perencanaan, koordinasi, maupun pelaksanaan kebijakan revitalisasi vokasi. Informasi yang diperoleh dari para informan ini diharapkan dapat memperkuat validitas data dan mendukung analisis terhadap efektivitas implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Adapun daftar informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

- 1) Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (1 orang)
- 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara (Bidang Seksi Sertifikasi Pelatihan Balai Pelatihan Kerja dan BLK) (1 orang).
- 3) Bappeda Provinsi Sulawesi Utara (1 orang)
- 4) Instruktur atau Pelatih dari Balai Latihan Kerja (BLK) di Sulut (1 orang)
- 5) Peserta/Alumni Pelatihan di BLK (3 orang)

Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang digunakan secara terpadu untuk membangun pemahaman yang utuh mengenai pelaksanaan kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Provinsi Sulawesi Utara.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari para informan melalui proses interaksi lapangan. Data ini dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung, serta pencatatan hasil temuan selama proses penelitian berlangsung. Informasi yang termasuk dalam kategori ini mencakup tanggapan, pandangan, dan pengalaman para informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam

pelaksanaan kebijakan, serta dokumentasi proses dan dinamika pelaksanaan kebijakan yang diamati oleh peneliti secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis dan dokumentasi yang mendukung atau memperkaya data primer. Sumber data ini mencakup literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, laporan tahunan lembaga, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, arsip resmi, serta publikasi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder digunakan untuk memberikan kerangka teoritis, konteks kebijakan, dan informasi pendukung yang diperlukan dalam menganalisis hasil temuan lapangan secara lebih menyeluruh dan valid.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Provinsi Sulawesi Utara, peneliti menerapkan berbagai metode pengumpulan data yang sejalan dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan teknik-teknik ini bertujuan untuk menggali secara menyeluruh perspektif dan pengalaman para informan yang terlibat secara langsung dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama dalam

pengumpulan data primer. Teknik ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka, untuk memberikan ruang kepada informan menjelaskan pengalaman, persepsi, dan pengetahuan mereka mengenai pelaksanaan kebijakan vokasi. Informan terdiri dari pejabat struktural dan teknis di OPD terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bappeda), perwakilan dunia usaha dan industri (DUDI), serta pelaku pendidikan vokasi lainnya. Wawancara dilakukan secara langsung di lokasi masing-masing informan atau melalui media komunikasi daring, jika diperlukan.

2. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan untuk memperoleh data kontekstual mengenai situasi dan dinamika implementasi kebijakan di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti mengamati interaksi antaraktor pelaksana, praktik koordinasi kelembagaan, serta kondisi aktual fasilitas pendidikan dan pelatihan vokasi. Observasi membantu memperkuat validitas temuan dari wawancara dengan memberikan bukti visual dan faktual dari proses implementasi.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari wawancara dan observasi. Data diperoleh dari dokumen resmi seperti Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022, Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 571 Tahun 2023, laporan

program kerja instansi terkait, notulen rapat koordinasi Tim Koordinasi Daerah (TKD), data statistik ketenagakerjaan, dan laporan evaluasi internal instansi pelaksana. Teknik ini digunakan untuk menelusuri landasan normatif, kebijakan operasional, serta aspek keberhasilan pelaksanaan program vokasi.

Penggunaan ketiga teknik ini secara triangulatif bertujuan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, serta membangun pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.

Teknis Analisis Data

Sejalan dengan pendekatan yang diadopsi untuk menelaah secara mendalam proses pelaksanaan kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Provinsi Sulawesi Utara. Proses analisis dilakukan untuk menginterpretasikan, mengelompokkan, serta menggali makna dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan langsung, dan penelaahan dokumen. Analisis data dalam penelitian ini menurut Miles dan Huberman (2014), yang mencakup, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Pada tahap awal ini, peneliti melakukan seleksi terhadap seluruh informasi yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, serta dokumen. Data yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian akan dihilangkan, sementara informasi yang berhubungan langsung dengan variabel utama seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

organisasi akan diringkas, diklasifikasi, dan disusun berdasarkan kategori tertentu. Tujuannya adalah menyederhanakan kompleksitas data lapangan agar lebih terarah dan siap untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah proses penyaringan selesai, data yang telah direduksi kemudian disusun dalam format yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Penyajian ini bisa berbentuk narasi deskriptif, tabel, grafik, peta konsep, atau matriks tematik yang menampilkan hubungan antar unsur dalam kebijakan yang diteliti. Tahapan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah pola, kecenderungan, serta hubungan sebab-akibat antara variabel yang berperan dalam proses implementasi kebijakan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Langkah akhir dari analisis data adalah menyusun kesimpulan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari data yang telah disajikan. Peneliti merumuskan interpretasi sementara atas makna yang terkandung dalam data, kemudian melakukan proses pembuktian terhadap temuan tersebut melalui konfirmasi silang atau triangulasi dengan sumber data lain, konsultasi kepada narasumber, atau pengkajian kembali dokumen terkait. Tujuan verifikasi adalah untuk memastikan bahwa hasil simpulan bersifat valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di kawasan timur Indonesia yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Laut Maluku di sebelah timur, Laut Sulawesi di utara, Provinsi Gorontalo di barat, dan Laut Maluku di selatan. Secara administratif, Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 15 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, serta Kota Manado, Bitung, Tomohon, dan Kotamobagu. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara mencapai 13.892,47 km², dengan karakteristik wilayah yang didominasi oleh dataran tinggi, pesisir pantai, dan kepulauan. Letak geografis ini menjadikan Sulawesi Utara memiliki potensi ekonomi yang beragam, terutama pada sektor pariwisata, perikanan, pertanian, dan industri jasa, yang kesemuanya membutuhkan dukungan tenaga kerja terampil melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

Secara demografis, berdasarkan data *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024*, jumlah penduduk provinsi ini mencapai sekitar 2,7 juta jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 69,3%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja produktif cukup tinggi, namun sebagian besar masih bekerja pada sektor informal dengan tingkat keterampilan yang terbatas. Oleh karena itu, keberadaan pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi

sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah.

Implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Provinsi Sulawesi Utara berawal dari tindak lanjut program nasional Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Pendidikan Profesi (2020–2024) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan keterkaitan (*link and match*) antara lembaga pendidikan vokasi, dunia industri, dan pemerintah daerah.

Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah prioritas penerapan program ini karena memiliki potensi industri yang berkembang di wilayah pesisir dan kawasan ekonomi khusus (KEK) Likupang, serta kebutuhan tenaga kerja terampil di bidang perhotelan, pariwisata bahari, pertanian modern, dan logistik maritim. Sejak tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah membentuk tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah binaan Kementerian Ketenagakerjaan. Kerja sama juga dijalin dengan berbagai dunia usaha dan industri melalui forum *vokasi daerah*, terutama di bidang pariwisata, perhotelan, dan industri kreatif.

Berdasarkan *Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 571 Tahun 2023*, struktur Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dibentuk

secara lintas perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut:

Jabatan / Unsur	Keterangan	Peran Utama dalam Revitalisasi
Gubernur Sulawesi Utara	Ketua Pengarah	Penetapan arah kebijakan dan persetujuan program lintas sektor
Sekretaris Daerah Provinsi Sulut	Ketua Harian	Koordinasi antar-perangkat daerah dan monitoring pelaksanaan
Kepala Dinas Pendidikan Daerah	Anggota / Penanggung jawab sektor pendidikan	Pembinaan SMK, sinkronisasi kurikulum vokasi, kemitraan dengan industri
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota	Pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi melalui BLK
Kepala Bappeda Provinsi	Anggota	Integrasi program vokasi dalam rencana pembangunan daerah
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	Fasilitasi kemitraan industri dan promosi tenaga kerja terampil
Kepala Dinas Pariwisata	Anggota	Pengembangan vokasi berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif
Perguruan Tinggi / Politeknik	Anggota	Penguatan pendidikan tinggi vokasi dan riset terapan
Asosiasi Dunia Usaha dan Industri (APINDO, KADIN, PHRI)	Mitra eksternal	Penyerapan lulusan, penyediaan tempat magang, dan kurikulum bersama
Balai Guru Penggerak (BGP) Sulut	Sekretariat Teknis	Pendampingan kompetensi pendidik dan pelatihan pengelola vokasi

Tim ini bekerja berdasarkan prinsip *kolaborasi multi-sektor*, di mana setiap unsur memiliki tanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan sesuai bidang kewenangannya. Mekanisme kerja tim meliputi rapat koordinasi tahunan, sinkronisasi program lintas perangkat daerah, serta pelaporan periodik kepada Gubernur dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Struktur kelembagaan yang menangani pelaksanaan kebijakan revitalisasi vokasi di Sulawesi Utara melibatkan beberapa instansi utama:

1. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, berperan sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan menengah kejuruan (SMK) dan pendidikan vokasi daerah.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, bertanggung jawab dalam pembinaan pelatihan vokasional melalui Balai Latihan

Kerja (BLK) serta sertifikasi tenaga kerja.

3. Balai Latihan Kerja (BLK) Manado, menjadi lembaga teknis pelaksana yang menyediakan berbagai pelatihan berbasis kompetensi industri.
4. Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, bertugas menyelaraskan kebijakan perencanaan daerah dengan kebijakan nasional bidang vokasi dan ketenagakerjaan.
5. Forum Komunikasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah dalam merancang kurikulum berbasis kebutuhan kerja.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menjalin kerja sama dengan SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK) di beberapa kabupaten/kota seperti Manado, Bitung, dan Minahasa Utara. Program ini mendukung peningkatan kualitas pembelajaran berbasis industri melalui *teaching factory* dan magang industri bagi peserta didik.

Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara sebagai lokasi penelitian didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, secara empiris provinsi ini sedang mengakselerasi implementasi kebijakan nasional revitalisasi vokasi melalui berbagai program kerja konkret di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Kedua, Sulawesi Utara memiliki karakteristik geografis dan ekonomi yang unik — sebagai daerah kepulauan dengan pertumbuhan sektor pariwisata, perikanan, dan jasa yang tinggi — sehingga kebutuhan tenaga kerja

vokasional menjadi faktor strategis dalam pembangunan daerah.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana kebijakan revitalisasi vokasi diimplementasikan di daerah dengan karakteristik kepulauan dan multikultur seperti Sulawesi Utara, sekaligus memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan ke depan.

Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang bertujuan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing di era globalisasi dan industrialisasi. Kebijakan ini diluncurkan pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang *Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)* dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Inti dari kebijakan ini adalah membangun sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, dengan pendekatan *link and match* antara lembaga pendidikan, pelatihan, dan dunia usaha/dunia industri (DUDI).

Secara substansial, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi diarahkan untuk mengubah paradigma pendidikan dari yang bersifat *supply driven* menjadi *demand driven*, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kebutuhan nyata pasar kerja dan perkembangan teknologi. Program ini menuntut sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan kejuruan, balai latihan kerja, serta pelaku industri agar menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya

memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kompetensi adaptif dan sikap profesional.

Dalam konteks daerah, kebijakan ini diterjemahkan melalui berbagai program yang melibatkan dinas-dinas teknis, seperti Dinas Pendidikan Daerah dan Dinas Tenaga Kerja, serta dikoordinasikan oleh Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah. Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi, mengingat struktur ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, pertanian, dan industri pengolahan hasil laut.

Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Sulawesi Utara menjadi penting karena tantangan ketenagakerjaan di daerah ini masih cukup kompleks. Berdasarkan data ketenagakerjaan, sebagian besar pengangguran terbuka berasal dari lulusan pendidikan menengah, termasuk SMK. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, melalui kebijakan revitalisasi ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat peran SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pembentukan tenaga kerja siap pakai yang berdaya saing.

Upaya revitalisasi tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, antara lain peningkatan kompetensi guru dan instruktur, pembaruan sarana-prasarana praktik, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, pengembangan kemitraan antara SMK/BLK dengan dunia usaha dan dunia industri, serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik dan peserta pelatihan. Kebijakan ini tidak hanya

bertujuan meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun karakter kerja, disiplin, dan etos profesional yang dibutuhkan di dunia kerja modern.

Namun, pelaksanaan kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di tingkat daerah tidak lepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran daerah, kurangnya tenaga pengajar bersertifikat industri, peralatan praktik yang belum mutakhir, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tujuan kebijakan ini secara efektif. Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat sinergi lintas sektor agar kebijakan ini dapat memberikan hasil nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Utara.

Dengan demikian, implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Provinsi Sulawesi Utara bukan sekadar upaya administratif, tetapi merupakan proses strategis untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten, adaptif, dan mampu berperan dalam pembangunan ekonomi daerah. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sehingga lulusan SMK dan peserta pelatihan memiliki peluang lebih besar untuk terserap di sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian Sulawesi Utara.

Pendidikan vokasi di Provinsi Sulawesi Utara memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan daerah, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi perubahan

struktur ekonomi regional maupun global. Sebagai provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, Sulawesi Utara memiliki karakteristik geografis yang unik dan potensi ekonomi yang beragam, mulai dari sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, jasa, hingga industri pengolahan. Kondisi ini menuntut tersedianya tenaga kerja terampil yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga kecakapan adaptif terhadap perkembangan teknologi, digitalisasi, dan kebutuhan industri masa kini.

Pendidikan vokasi di Sulawesi Utara diselenggarakan melalui berbagai jalur, yaitu pendidikan menengah kejuruan (SMK), pendidikan tinggi vokasi (politeknik dan akademi), serta lembaga pelatihan kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di bawah pembinaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut tahun 2023, jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai lebih dari 230 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota, dengan jumlah peserta didik lebih dari 75.000 siswa. Sebagian besar SMK tersebut memiliki program keahlian yang relevan dengan potensi lokal seperti agribisnis dan agroteknologi, perikanan dan kelautan, pariwisata dan perhotelan, teknik otomotif, teknologi informasi dan komunikasi, serta bisnis dan manajemen.

Ketersediaan lembaga pendidikan vokasi di Sulawesi Utara turut didukung oleh keberadaan beberapa perguruan tinggi vokasi, seperti Politeknik Negeri Manado, Politeknik Negeri Nusa Utara (Tahuna),

Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, Politeknik Negeri Bitung, serta Politeknik Informatika Nasional Manado. Perguruan tinggi vokasi tersebut berperan dalam menyediakan lulusan dengan jenjang Diploma II, III, dan IV yang lebih terarah pada penguasaan keahlian praktis di bidang teknik, pariwisata, kesehatan, dan kelautan. Sinergi antara pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi menjadi penting untuk menciptakan ekosistem pembelajaran berkelanjutan yang menjembatani kebutuhan dunia kerja dan peningkatan daya saing daerah.

Selain lembaga formal, Sulawesi Utara juga memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) baik milik pemerintah maupun swasta yang tersebar di sejumlah daerah, antara lain BLK Provinsi Sulut di Manado, BLK Bitung, BLK Sangihe, serta beberapa LPK di kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, dan Bolaang Mongondow. BLK dan LPK berfungsi melatih calon tenaga kerja di berbagai bidang keterampilan seperti pengelasan, menjahit, otomotif, desain grafis, perhotelan, pengolahan hasil perikanan, hingga pengembangan teknologi digital dasar.

Sejak dicanangkannya program *Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi* oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang *Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi*, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menyusun berbagai langkah implementatif. Salah satu bentuk konkret adalah pembentukan Tim Koordinasi Daerah *Revitalisasi Pendidikan*

dan Pelatihan Vokasi Provinsi Sulawesi Utara melalui *Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 571 Tahun 2023*. Tim ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan Daerah, Disnakertrans, Bappeda, Dinas Pariwisata, perwakilan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), asosiasi profesi, serta perguruan tinggi vokasi. Program revitalisasi di Sulut diarahkan pada empat pilar utama, yaitu:

1. Penguatan tata kelola pendidikan vokasi dengan memperkuat kerja sama SMK–industri dan pengelolaan kurikulum berbasis kebutuhan kerja (*demand-driven curriculum*).
2. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui program *upskilling* dan *reskilling* yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Balai Guru Penggerak (BGP) Sulut.
3. Perluasan akses dan kualitas sarana prasarana vokasi, termasuk pengadaan alat praktik modern, bengkel industri, dan laboratorium digital di sejumlah SMK unggulan.
4. Penguatan kemitraan dan *link-and-match* antara lembaga pendidikan vokasi dengan dunia kerja melalui magang, program *Teaching Factory*, serta *Dual System Education*.

Berdasarkan laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara serta Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Sulut, pelaksanaan program pelatihan vokasi menunjukkan tren peningkatan jumlah peserta setiap tahunnya. Data berikut disusun berdasarkan laporan

internal Disnakertrans (2024) dan publikasi kegiatan pelatihan dari 2022 hingga pertengahan 2025.

Tabel 4.3 Program pelatihan vokasi 2022 hingga pertengahan 2025 Di Sulawesi Utara

Tahun	Jumlah program Pelatihan	Jumlah Peserta yang dilatih	Lembaga Peaksana (BLK/LPK)	Bidang Keahlian Dominan
2022	48 paket pelatihan	1.120 peserta	BLK Prov. Sulut, BLK Bitung, BLK Sangihe	Otomotif, Menjahit, Tata Boga
202	56 paket pelatihan	1.340 peserta	BLK Prov. Sulut, LPK Swasta, Program Mobile Training Unit	Desain Grafis, Las, Kelistrikan, Pariwisata
202	63 paket pelatihan	1.580 peserta	BLK Prov. Sulut, Disnakertrans Kab/Kota, DUDI Mitra	Digital Marketing, Hospitality, Kelautan
2025*	68 paket pelatihan	1.720 peserta (target)	BLK Prov. Sulut, LPK Mitra Industri	Teknologi Informasi, UMKM, Agroindustri

Sumber: Disnakertrans Prov. Sulawesi Utara, Laporan Kinerja 2024 (diolah peneliti, 2025)

Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin serius memperluas akses pelatihan berbasis kompetensi dan memperbanyak jenis keahlian sesuai kebutuhan pasar kerja lokal maupun regional. Pelatihan diarahkan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja muda dan masyarakat pencari kerja, khususnya di sektor-sektor yang menjadi unggulan Sulawesi Utara seperti pariwisata bahari, kelautan, perikanan tangkap dan budidaya, serta jasa hospitality dan ekonomi kreatif.

Implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Provinsi Sulawesi Utara dijalankan melalui tiga mekanisme utama:

a. Perencanaan Terpadu

Tahapan perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui forum koordinasi yang melibatkan Dinas Pendidikan, Disnakertrans, Bappeda, dan perwakilan industri. Setiap lembaga mengusulkan program pelatihan dan kegiatan penguatan kompetensi berdasarkan kebutuhan sektor unggulan daerah, seperti pariwisata bahari, perikanan, pertanian, dan teknologi informasi. Dokumen perencanaan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan disesuaikan dengan Renstra masing-masing perangkat daerah.

b. Pelaksanaan Program

Pada tahap pelaksanaan, Dinas Pendidikan mengelola kegiatan peningkatan mutu SMK dan penguatan *link and match* dengan industri, sedangkan Disnakertrans menjalankan program pelatihan kerja berbasis kompetensi di BLK dan LPK. Pelaksanaan kegiatan melibatkan dunia usaha sebagai mitra industri dalam program magang, sertifikasi, dan uji kompetensi. Selain itu, Tim Koordinasi Daerah berperan memastikan tidak terjadi tumpang tindih antara program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, serta memastikan adanya kesinambungan antara lulusan SMK dan program pelatihan lanjutan.

c. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Daerah bersama Bappeda Provinsi. Indikator

keberhasilan meliputi jumlah peserta pelatihan, tingkat serapan kerja, jumlah kerja sama SMK–industri, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pelatih. Laporan hasil pelaksanaan kebijakan disusun setiap tahun dan menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya. Selain laporan internal, Pemerintah Provinsi juga wajib menyampaikan laporan implementasi kebijakan revitalisasi vokasi kepada pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Pola Sinergi dan Kolaborasi Multi-Sektor

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan pendekatan *quadruple helix* dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan vokasi, yaitu sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia industri, dan masyarakat. Model ini diyakini mampu mempercepat peningkatan kualitas SDM lokal karena mendorong adanya pertukaran sumber daya, informasi, dan inovasi antar pihak. Sebagai contoh, program *SMK Pusat Keunggulan* di Sulut melibatkan industri dalam perencanaan kurikulum, pelaksanaan magang, serta rekrutmen tenaga kerja, sementara BLK menjalin kerja sama dengan dunia usaha untuk pelatihan berbasis proyek nyata (*project-based training*).

Selain itu, Pemerintah Provinsi melalui Disnakertrans telah mengembangkan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Program Mobile Training Unit (MTU) untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Pada tahun 2024, tercatat 63 paket pelatihan

telah dilaksanakan di 11 kabupaten/kota dengan total 1.580 peserta, sedangkan untuk tahun 2025 ditargetkan meningkat menjadi 68 paket pelatihan dengan sasaran 1.720 peserta (Disnakertrans Sulut, 2024).

Pola sinergi ini diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah daerah dan dunia usaha, seperti *MoU antara Dinas Pendidikan Daerah Sulut dan PT PLN (Persero) UPDK Manado* dalam pengembangan pelatihan teknik kelistrikan, serta kerja sama antara *BLK Sulut dengan Asosiasi Pengusaha Perhotelan Manado* untuk program pelatihan perhotelan dan barista.

Implikasi Struktural terhadap Efektivitas Kebijakan

Struktur kelembagaan yang terintegrasi di Provinsi Sulawesi Utara memberikan dasar kuat bagi keberlanjutan kebijakan revitalisasi vokasi. Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Disnakertrans memungkinkan keterpaduan antara pendidikan formal dan non-formal, sehingga lulusan SMK dapat melanjutkan pelatihan lanjutan untuk memperoleh sertifikasi kompetensi. Namun demikian, efektivitas kelembagaan masih sangat bergantung pada konsistensi komunikasi antar instansi, ketersediaan data tenaga kerja terampil, serta dukungan pembiayaan daerah.

Dalam konteks implementasi kebijakan, struktur ini juga memegang peran penting dalam mewujudkan *human capital development* yang menjadi prioritas pembangunan Sulawesi Utara. Dengan kolaborasi antara sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan industri, diharapkan Provinsi Sulawesi Utara mampu

menghasilkan tenaga kerja vokasi yang kompetitif, produktif, dan siap menghadapi transformasi ekonomi menuju era digital serta industri 4.0.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di provinsi Sulawesi Utara yang di fokuskan pada indicator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, dijabarkan sebagai berikut:

a. Indikator Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur fundamental dalam proses implementasi kebijakan, karena melalui komunikasi kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dapat diterjemahkan secara operasional di tingkat daerah. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diperoleh gambaran bahwa proses komunikasi kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi telah dilakukan melalui berbagai jalur, baik formal maupun informal. Komunikasi formal dilakukan melalui surat edaran, rapat koordinasi lintas sektor, forum sinkronisasi program, serta kegiatan sosialisasi kebijakan yang melibatkan sekolah kejuruan, Balai Latihan Kerja (BLK), perguruan tinggi vokasi, dan mitra industri. Sedangkan komunikasi informal lebih banyak terjadi dalam bentuk koordinasi langsung antar pejabat teknis atau antara lembaga pelaksana dengan dunia usaha yang menjadi mitra dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis industri.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pola komunikasi yang dikembangkan lebih bersifat top-down, yaitu berasal dari pemerintah pusat dan diturunkan kepada pelaksana di daerah. Namun, dalam implementasinya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga berupaya membangun komunikasi dua arah melalui forum diskusi dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sektoral. Melalui forum ini, kebutuhan daerah dan masukan dari lembaga pendidikan serta industri dapat dijadikan dasar penyesuaian kebijakan. Meski demikian, pelaksana di lapangan masih mengakui adanya hambatan, seperti keterlambatan informasi, kurangnya kejelasan mengenai petunjuk teknis, serta perbedaan persepsi antara lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Pratiknjo (2024) yang menegaskan bahwa *“keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh tingkat kejelasan dan konsistensi komunikasi yang dibangun antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Komunikasi yang tidak terstruktur dengan baik dapat menimbulkan interpretasi ganda yang berakibat pada penyimpangan implementasi.”* Sementara itu, Londa (2016) berpendapat bahwa *“hambatan komunikasi sering kali muncul karena lemahnya kapasitas organisasi dan perbedaan orientasi antarinstansi pemerintah di daerah.”* Dalam

konteks Sulawesi Utara, komunikasi yang masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi antar instansi menjadi faktor penghambat utama efektivitas implementasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi kebijakan yang lebih terbuka, kolaboratif, dan adaptif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan vokasi secara rutin agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan revitalisasi.

b. Indikator Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta pengelola Balai Latihan Kerja di Manado dan Bitung, diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan berbagai upaya penguatan sumber daya pendukung kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan kapasitas tenaga pengajar dan instruktur, penyediaan sarana prasarana pelatihan, pengembangan program pelatihan berbasis industri (*industry-based training*), serta pengalokasian anggaran untuk kegiatan vokasi dari dana APBD maupun APBN.

Meski terdapat kemajuan, sebagian besar informan mengakui bahwa sumber daya yang tersedia masih belum sebanding dengan tuntutan program. Jumlah instruktur kompeten

yang memiliki sertifikasi nasional masih terbatas, terutama di bidang teknik industri, pariwisata, dan otomotif yang menjadi sektor prioritas daerah. Fasilitas pelatihan di BLK juga belum sepenuhnya mutakhir untuk mendukung kebutuhan keterampilan digital dan teknologi 4.0. Beberapa program pelatihan terpaksa dijalankan dengan peralatan konvensional karena keterbatasan anggaran. Selain itu, distribusi sumber daya antar kabupaten/kota juga belum merata; sebagian besar program vokasi masih terpusat di wilayah perkotaan seperti Manado, Tomohon, dan Bitung.

Hal ini memperkuat pernyataan Londa (2016) yang menjelaskan bahwa *“keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan teknologis merupakan tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan vokasi di daerah.”* Sedangkan menurut Pratiknjo (2024), *“sumber daya yang memadai tidak hanya ditentukan oleh jumlah, tetapi juga oleh kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan implementasi kebijakan.”* Dengan demikian, meskipun kebijakan revitalisasi telah direspons positif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, efektivitasnya masih bergantung pada keberlanjutan dukungan sumber daya, terutama dalam peningkatan kompetensi tenaga pengajar, pemutakhiran fasilitas pelatihan, dan peningkatan alokasi dana pendidikan vokasi. Diperlukan pula strategi kolaborasi dengan pihak swasta dan industri untuk memperkuat ekosistem

sumber daya pelatihan yang lebih berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

- c. Indikator Disposisi (Sikap Pelaksana)
Sikap pelaksana merupakan aspek yang mencerminkan seberapa besar komitmen dan motivasi aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan publik. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksana kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya pejabat struktural dan tenaga teknis di Dinas Pendidikan serta BLK, menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan ini. Mereka menilai bahwa kebijakan revitalisasi sangat relevan dengan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan daya saing tenaga kerja dan kemandirian ekonomi lokal. Sikap antusias terlihat dari inisiatif pelaksana dalam mengembangkan program kemitraan dengan dunia industri, memperluas bidang pelatihan, dan mendorong inovasi kurikulum berbasis kebutuhan lapangan kerja.

Namun, dari hasil wawancara juga terungkap bahwa meskipun terdapat sikap positif, masih ada perbedaan tingkat komitmen antar pelaksana di berbagai tingkat birokrasi. Di tingkat pelaksana teknis, terdapat keluhan mengenai beban kerja yang tinggi, keterbatasan insentif, dan kurangnya dukungan struktural yang memadai. Hal ini menyebabkan beberapa pelaksana bersikap pasif dan menjalankan program secara

administratif tanpa inovasi. Pratiknjo (2024) menegaskan bahwa *“disposisi pelaksana sangat dipengaruhi oleh lingkungan birokrasi tempat mereka bekerja; pelaksana dengan dukungan organisasi yang kuat cenderung memiliki sikap positif dan inisiatif tinggi.”* Sementara itu, Londa (2016) menambahkan bahwa *“sikap pelaksana merupakan refleksi dari sejauh mana mereka merasa memiliki kebijakan tersebut; semakin tinggi tingkat partisipasi pelaksana dalam perumusan kebijakan, semakin besar pula rasa tanggung jawab mereka dalam implementasi.”*

Dalam konteks Sulawesi Utara, kebijakan revitalisasi vokasi masih didominasi oleh desain kebijakan pusat, sehingga ruang partisipasi pelaksana daerah masih terbatas. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat peran pelaksana daerah melalui pemberian kewenangan adaptif, mekanisme umpan balik, serta sistem penghargaan berbasis kinerja agar disposisi pelaksana dapat terus positif, konsisten, dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan.

d. Indikator Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan indikator yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan, karena berhubungan langsung dengan tata kelola, alur koordinasi, serta pembagian kewenangan antar lembaga pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara, struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan

vokasi di Provinsi Sulawesi Utara melibatkan beberapa lembaga, antara lain Dinas Pendidikan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bappeda, Balai Latihan Kerja, serta mitra industri. Masing-masing instansi memiliki peran berbeda namun saling berkaitan, sehingga keberhasilan program sangat bergantung pada efektivitas koordinasi dan sinergi antar lembaga tersebut.

Dalam praktiknya, pelaksana di lapangan menghadapi tantangan birokrasi yang cukup kompleks. Mekanisme pengambilan keputusan masih bersifat hierarkis, sehingga koordinasi lintas sektor sering memerlukan waktu yang lama. Beberapa program pelatihan bahkan berjalan tumpang tindih karena kurangnya integrasi data antar lembaga. Di sisi lain, sistem pelaporan dan evaluasi masih bersifat administratif dan belum berbasis kinerja atau output. Keadaan ini menyebabkan pelaksanaan program sering berorientasi pada penyerapan anggaran, bukan pada capaian hasil pelatihan.

Kondisi tersebut sesuai dengan pandangan Londa (2016) yang menyatakan bahwa *“struktur birokrasi di daerah sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan karena terlalu kaku dan lambat beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat.”* Sementara Pratiknjo (2024) menekankan bahwa *“restrukturisasi birokrasi dan pembentukan tim koordinasi lintas*

sektor merupakan langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.” Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Sulawesi Utara akan meningkat apabila struktur birokrasi diperkuat melalui mekanisme koordinasi terpadu, penyederhanaan alur kewenangan, dan peningkatan kapasitas organisasi pelaksana. Pembentukan *Forum Koordinasi Vokasi Daerah (FKVD)* yang melibatkan semua pemangku kepentingan menjadi salah satu rekomendasi penting untuk mempercepat proses integrasi antar lembaga dan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Dari indikator komunikasi, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara lembaga pelaksana dengan dunia industri, telah berjalan namun belum sepenuhnya efektif. Informasi kebijakan telah disampaikan melalui berbagai saluran formal seperti rapat koordinasi, forum

vokasi, dan sosialisasi kebijakan. Akan tetapi, masih ditemukan adanya kesenjangan pemahaman di tingkat pelaksana teknis dan lembaga pendidikan vokasi. Koordinasi lintas sektor belum optimal, sehingga pelaksanaan di lapangan cenderung berjalan secara parsial. Dengan demikian, efektivitas komunikasi masih perlu ditingkatkan agar seluruh pelaksana memiliki persepsi dan arah kebijakan yang sama.

2. Dari indikator sumber daya, sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik sumber daya manusia, finansial, maupun sarana prasarana, menunjukkan kemajuan, tetapi belum mencukupi untuk mendukung implementasi kebijakan secara optimal. Pelatihan vokasi masih menghadapi keterbatasan instruktur bersertifikat dan fasilitas modern yang sesuai dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, alokasi anggaran belum terdistribusi merata di seluruh wilayah kabupaten/kota. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan melalui pelatihan dan kemitraan dengan industri, namun masih memerlukan dukungan berkelanjutan agar program revitalisasi dapat berjalan efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
3. Dari indikator Disposisi (Sikap Pelaksana), pelaksana kebijakan menunjukkan sikap yang positif dan mendukung terhadap kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Mereka memahami bahwa

kebijakan ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menekankan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Namun, semangat pelaksana di lapangan masih bervariasi; sebagian menghadapi kendala motivasi akibat keterbatasan fasilitas, insentif, dan dukungan struktural. Sikap pelaksana yang proaktif dan inovatif masih ditemukan di pusat-pusat kegiatan utama seperti Manado dan Bitung, sementara di daerah periferal pelaksana cenderung bersikap administratif. Oleh karena itu, pembinaan motivasi dan penguatan etos kerja menjadi faktor kunci dalam menjaga konsistensi implementasi.

4. Dari indikator Struktur Birokrasi, struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan revitalisasi vokasi di Provinsi Sulawesi Utara masih tergolong hierarkis dan sektoral. Keterlibatan beberapa instansi—seperti Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, BLK, dan Bappeda—belum diimbangi dengan sistem koordinasi terpadu. Akibatnya, terjadi tumpang tindih program dan kurangnya integrasi data antar lembaga. Meskipun sudah ada forum koordinasi vokasi, perannya belum berjalan optimal karena belum dilengkapi dengan dasar hukum yang kuat dan mekanisme kerja yang jelas. Struktur birokrasi yang masih kaku ini menghambat percepatan pelaksanaan kebijakan dan memengaruhi efektivitas hasil program di lapangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran-saran yang diajukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Terkait Indikator Komunikasi

Diperlukan penguatan strategi komunikasi kebijakan yang bersifat dua arah dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia industri. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu membentuk *Forum Komunikasi Vokasi Daerah* yang aktif melakukan sosialisasi, diskusi tematik, dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kebijakan. Selain itu, peningkatan kapasitas komunikasi pejabat pelaksana di tingkat kabupaten/kota juga penting untuk memastikan keseragaman informasi dan pemahaman kebijakan di semua level implementasi.

2. Terkait Indikator Sumber Daya

Pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi pada sumber daya manusia pelaksana melalui pelatihan berjenjang, sertifikasi kompetensi, serta pembaharuan fasilitas pelatihan dan sarana praktik di BLK dan SMK. Kolaborasi dengan dunia industri perlu diperluas agar pelatihan vokasi lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pembiayaan revitalisasi perlu diintegrasikan dalam rencana pembangunan daerah agar tidak bergantung sepenuhnya pada program pusat. Pemerataan distribusi sumber daya ke seluruh wilayah

kabupaten/kota juga harus menjadi prioritas agar kebijakan tidak hanya efektif di kawasan perkotaan.

3. Terkait Indikator Disposisi (Sikap Pelaksana)

Diperlukan peningkatan motivasi dan profesionalisme pelaksana melalui sistem insentif berbasis kinerja dan penghargaan terhadap inovasi dalam pelaksanaan program vokasi. Pemerintah daerah juga sebaiknya membuka ruang partisipasi lebih luas bagi pelaksana dalam tahap perencanaan dan evaluasi kebijakan, agar rasa memiliki terhadap program meningkat. Pembinaan moral dan etos kerja pelaksana dapat dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan, coaching, dan mentoring berkelanjutan agar sikap positif terhadap kebijakan tetap terjaga dan berdampak pada peningkatan kualitas implementasi di lapangan.

4. Terkait Indikator Struktur Birokrasi

Perlu dilakukan restrukturisasi dan penyederhanaan alur birokrasi agar implementasi kebijakan lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta dunia industri. Pemerintah Provinsi disarankan membentuk unit kerja lintas sektor atau *Task Force Revitalisasi Vokasi* yang memiliki kewenangan koordinatif untuk mempercepat pengambilan keputusan dan mengintegrasikan data pelaksanaan antar lembaga. Selain itu, perlu dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil (outcome-based management) yang dapat

menilai kinerja pelaksanaan secara objektif dan transparan. Reformasi struktur birokrasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstansi dan mempercepat pencapaian tujuan kebijakan revitalisasi vokasi di Provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2020). *RPJMN 2020–2024: Rencana pembangunan jangka menengah nasional*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Penelitian kualitatif dan desain riset: Memilih lima pendekatan utama* (edisi ke-4). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang *Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*
- Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 571 Tahun 2023, Struktur Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Londa, Y. V. 2016. Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Daerah Kepulauan (Studi Di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara). *Sosiohumaniora, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. ISSN: 1411-0911.
<https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9224>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.).

- Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan publik: Teori, analisis, dan manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Pratknjo, Maria. (2024). *Manajemen Implementasi Kebijakan Publik di Sektor Pendidikan dan Ketenagakerjaan*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Publishing.
- World Economic Forum. (2023). *Laporan masa depan pekerjaan tahun 2023*. Diakses melalui <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023>